

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI DATA

Deskripsi data merupakan salah satu upaya untuk menampilkan data agar data pada penelitian dapat dipaparkan dengan baik dan diinterpretasikan dengan mudah. Penelitian ini berlandaskan pada *filosofat positivisme* dengan menggunakan metode analisis data secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menekankan analisis pada data-data *numerical* (angka-angka) mulai dari pengumpulan data hingga pada hasilnya. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk saling mendukung hasil analisis dengan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari dua variable dimana variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

- 1) variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat dimana variabel bebasnya adalah APBN, Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi tahun 2010-2020;
- 2) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dimana variabel terikat dalam penelitian ini adalah anggaran pertahanan 2010-2020

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *data time series* berupa data dari tahun 2010 – 2020. Pengumpulan data sekunder merupakan proses pengumpulan data-data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti *World Bank*, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Bank Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Regresi Linear Berganda (*Ordinary Last Square*).

4.1.1 Deskripsi Data Anggaran Pertahanan

Pembangunan pertahanan menjadi semakin kompleks dan penuh dengan ketidak-pastian dewasa ini, disamping suatu bangsa memiliki cita-cita untuk membangun kekuatan pertahanan harus dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik. Pembangunan pertahanan tidak lepas dari dukungan anggaran pertahanan. Pada dasarnya pertahanan suatu negara tidak hanya terkait dengan satu persoalan negara, namun bersifat kompleks dan multi-proses. Seluruh warga negara patut dan harus memandang pertahanan bukan merupakan hal yang terpisah dengan bidang lain di pemerintah. Jika suatu negara memiliki pertahanan yang kuat maka akan memberi dampak pada kegiatan perekonomian yang menjadi lancar, tingkat stabilitas negara kuat dan selanjutnya investor akan berminat untuk berinvestasi di segala bidang.

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, alokasi anggaran pertahanan negara diharapkan dapat mendukung pembangunan pertahanan negara sesuai dengan Renstra Pembangunan Nasional. Dalam penyediaan produk pertahanan ini, negara harus melakukannya secara efektif dan efisien. Daya dukung anggaran pertahanan suatu negara yang juga merupakan bagian dari anggaran belanja negara dianggap sangat penting. Anggaran pertahanan juga merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan dan kebijakan negara dalam menyikapi sistem pertahanan yang digunakan serta untuk melihat sumber daya yang diberikan oleh negara kepada angkatan bersenjata, dan komitmen negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan. Komitmen pemerintah membangun pertahanan negara pada skala nasional dapat diwujudkan sebagai penentu kebijakan anggaran dengan memperkuat kebersamaan secara kolegial serta memprioritaskan anggaran pertahanan walaupun masih adanya beberapa kepentingan politik di tingkat DPR RI yang semakin panjang proses penyelesaiannya.

Kebijakan anggaran pertahanan sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain diantaranya perkembangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional, kemampuan keuangan negara, skala prioritas pembangunan, dan pandangan terhadap hakikat ancaman yang dihadapi negara. Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan *anggaran publik* yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Disisi lain, anggaran pertahanan juga memberi gambaran mengenai berapa banyak pertahanan yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya.

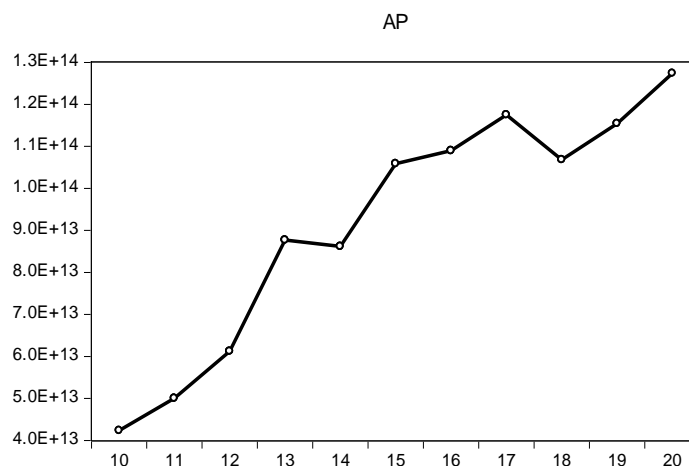
Tabel 4.1 Perkembangan Anggaran Pertahanan di Indonesia

TAHUN	AP
2010	42,391,600,000,000
2011	50,033,900,000,000
2012	61,226,856,461,000
2013	87,706,685,334,000
2014	86,185,628,390,000
2015	105,907,340,480,000
2016	109,003,928,025,000
2017	117,506,617,827,295
2018	106,832,343,039,117
2019	115,424,549,199,337
2020	127,424,093,734,000

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Sepanjang Periode 2010-2017, anggaran Pertahanan naik 154,8 persen. Disisi lain, Selama kurun waktu 2010-2020, anggaran pertahanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun terjadi penurunan di tahun 2018. Peningkatan anggaran pertahanan untuk mendukung proyek prioritas nasional, terutama pada pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI dan melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*MEF*) TNI menuju Kekuatan Pokok TNI, berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam

jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran tertinggi dicapai pada 2021 sebesar Rp127,4 triliun dan terendah pada 2010 sebesar Rp42,4 triliun. Hanya pada 2014, 2016, 2018 dan 2022 alokasi anggaran Kemhan mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 1,7%, minus 3,3%, minus 9% dan minus 8,4%. Secara rata-rata anggaran pertahanan tumbuh positif 9,5 persen pertahun atau naik dari Rp42,4 triliun pada 2010 menjadi Rp127,4 triliun pada 2020.



Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Anggaran Pertahanan di Indonesia

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020 (Diolah)

Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan Pemerintah. Selama ini, penentuan jumlah anggaran pertahanan berdasarkan kepada faktor kemampuan keuangan negara dan alokasi prioritas pembangunan pada setiap Renstra Pembangunan Nasional. Salah satu alasan meningkatnya anggaran pertahanan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah adanya kemajuan dari sisi ekonomi. Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk merealisasikan program yang berkaitan dengan militer termasuk diantaranya adalah pembelian dan modernisasi alutsista.

Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal. Dalam rangka mendukung tugas-tugas pertahanan dalam negeri, yakni mengatasi konflik dan menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar/terdepan, serta membantu Pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran (Buku Putih, 2016).

4.1.2 Deskripsi Data Anggaran Belanja Dan Pendapatan Negara (APBN)

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan suatu daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya dan disusun untuk tahun anggaran. Manfaat dilakukannya analisis terhadap dokumen APBN adalah untuk mengetahui model penerimaan dan pembiayaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Anggaran penerimaan belanja negara merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson, pengertian anggaran (budget) adalah "*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*". Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Penerimaan APBN berasal dari sektor-sektor penerimaan dalam negeri dan hibah. Sektor penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan sektor penerimaan

pajak dapat diuraikan yaitu pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya penerimaan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Selanjutnya, sektor penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, Penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum.

Pemerintah Indonesia senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis serta berkomitmen menjaga APBN yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat dari tahun ke tahunnya. Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan dan berdampak pada penerimaan negara, APBN berfungsi sebagai *countercyclical* yang memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi (Kemenkeu,2020).

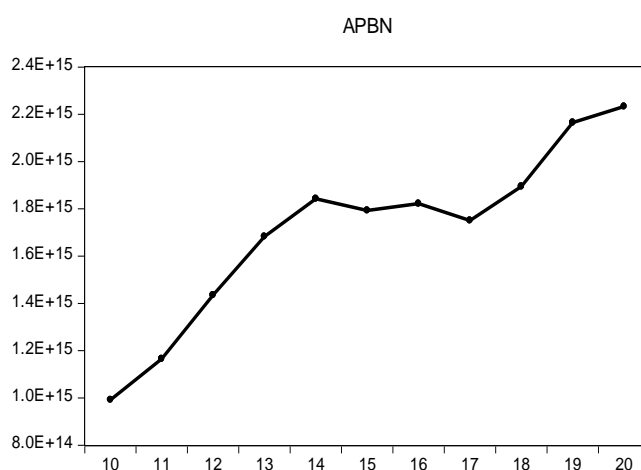
Tabel 4.2 Perkembangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Indonesia.

TAHUN	APBN
2010	992,248,500,000,000.00
2011	1,165,252,500,000,000.00
2012	1,435,406,719,000,000.00
2013	1,683,011,103,699,000.00
2014	1,842,495,299,913,000.00
2015	1,793,588,917,000,000.00
2016	1,822,545,849,136,000.00
2017	1,750,283,380,176,000.00
2018	1,894,720,327,000,000.00
2019	2,165,111,800,000,000.00
2020	2,233,196,701,660,000.00

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Berdasarkan uraian tabel penerimaan APBN Indonesia dari tahun 2010–2020, maka dapat diketahui trend pertumbuhan APBN. Pada keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor penerimaan APBN tahun 2010-2020 mengalami kondisi fluktuatif. Berdasarkan DIPA 2020,

belanja Negara pada tahun 2020 diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan, terutama melalui penguatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, penguatan pertahanan dan keamanan, serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa.



Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Indonesia.

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020 (Diolah)

Fenomena yang terjadi adalah pada tahun 2020 terdapat penyebaran virus Covid-19. Situasi pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi sendi-sendi perekonomian nasional, dimana mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi. Keuangan Negara melalui APBN menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Perkembangan realisasi APBN 2020 bahwa realisasi pendapatan negara berkontraksi 15,13% (yoy) dan realisasi belanja negara tumbuh sebesar 12,71% (yoy), serta defisit anggaran berada pada level 5,60 persen terhadap PDB (tahun 2019 2,34% terhadap PDB Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.233,19 triliun (84,21% dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp2.165,11

triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.165,11 triliun atau 77,46% dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 5,32% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk menjaga kesinambungan fiscal dan kredibilitas APBN, Pemerintah mengantisipasi pelebaran deficit yang diperkirakan mencapai 1,76% terhadap PDB. Dengan adanya antisipasi pelebaran deficit tersebut, Pemerintah secara hati-hati melakukan pengelolaan pembiayaan. Rasio defisit APBN terhadap PDB tahun 2020 adalah terendah dalam enam tahun terakhir. Hingga tahun 2020, Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal dan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara.

4.1.3 Deskripsi Data Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang lebih umum digunakan oleh berbagai negara dan untuk berbagai kepentingan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi dimana semakin tinggi PDB suatu Negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi di Negara tersebut dan digunakan sebagai indikator penilai/pengukur pembangunan suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, PDB berperan penting dalam pengambilan kebijakan seperti alat proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan dua konsep berbeda. Dari sisi pendekatan, pendapatan nasional mengacu pada konsep pendekatan pendapatan, sedangkan PDB mengacu pada konsep pendekatan produksi. Dari sisi metode

penghitungan dalam kerangka kerja *Full Sequence of Accounts* (FSA), PDB diturunkan dari neraca produksi barang dan jasa sementara pendapatan nasional diturunkan dari neraca alokasi pendapatan primer. Meskipun berbeda, PDB berperan penting dalam menghasilkan indikator pendapatan nasional.

Dalam konsep ekonomi, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang berperan penting menggambarkan keterkaitan kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara dengan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui kemampuan menghasilkan berbagai produk, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi, serta menambah asset yang dimiliki masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu.

Salah satu indikator alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasa disebut dengan pendapatan nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada periode tertentu. Besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal sebenarnya efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal dan uang) yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Jika pendapatan nasional semakin besar maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya perekonomian suatu negara. Meskipun pendapatan nasional merupakan indikator yang lebih tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara, PDB masih lebih banyak digunakan. Sebab, proses penghitungan PDB yang lebih mudah dan lebih mudah dan nilainya lebih mudah dibandingkan dengan negara lain. Pendapatan nasional melalui indikator PDB juga memiliki peranan penting dalam konteks kebijakan pemerintah. Peranan tersebut diantaranya:

- 1) Sebagai bahan monitor dan evaluasi hasil penerapan kebijakan pembangunan ekonomi sebelumnya.
- 2) Memberi gambaran keadaan pembangunan ekonomi masa kini

3) Dasar perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi mendatang berdasar hasil evaluasi sebelumnya.

Penghitungan PDB di Indonesia dilakukan berdasarkan dua pendekatan yaitu sisi produksi (lapangan usaha) dan sisi pengeluaran.

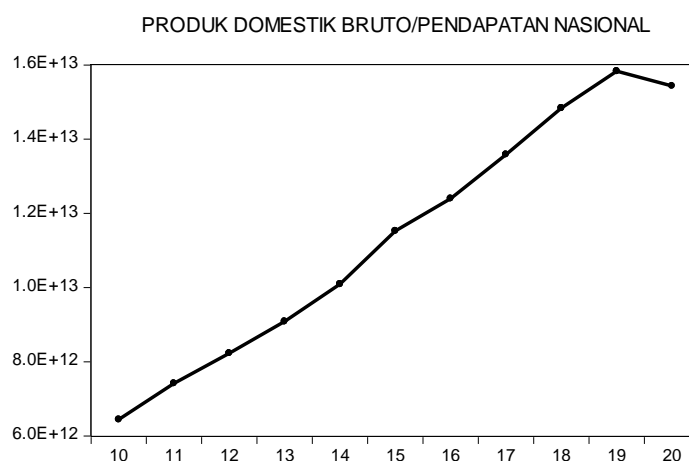
Berbicara mengenai anggaran pertahanan sudah barang tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) dan hal ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah. Persentase dari anggaran pertahanan terhadap PDB di suatu negara menjadi tolak ukur dasar dalam menilai tingkat ancaman dan bagaimana suatu negara dianggap tanggap dalam menyelamatkan bangsanya dan bahkan sampai kepada penilaian terhadap tujuan politik. PDB dan anggaran pertahanan sering digunakan sebagai rasio untuk menunjukkan seberapa penting sektor pertahanan dalam pendapatan nasional. Sebagai contoh, pembiayaan pertahanan akan sangat berat bagi negara kategori miskin karena porsi yang besar dari PDB negara miskin lebih banyak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak untuk digunakan dalam pembiayaan belanja pertahanan. Hal ini menjadi sangat kompleks jika negara tersebut menghadapi ancaman yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menanggulangnya.

Tabel 4.3 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia.

TAHUN	PDB
2010	6,446,851,900,000.00
2011	7,419,187,100,000.00
2012	8,230,925,900,000.00
2013	9,087,276,500,000.00
2014	10,094,928,900,000.00
2015	11,526,332,800,000.00
2016	12,401,728,500,000.00
2017	13,589,825,700,000.00
2018	14,838,756,000,000.00
2019	15,832,535,400,000.00
2020	15,434,151,800,000.00

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan baik pada tatanan global maupun lokal yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Berdasarkan data, perekonomian Indonesia dapat juga digambarkan melalui kondisi struktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan peranan dari masing-masing lapangan usaha maupun komponen pengeluaran dalam pembentukan PDB. Komponen pengeluaran yang konsisten mendominasi pembentukan ekonomi adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Barang dan Jasa. Pada tahun 2020, Komponen PK-RT mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia sebesar 57,66%; diikuti oleh PMTB sebesar 31,73 %; selanjutnya Ekspor Barang dan Jasa menyumbang sebesar 17,17% (BPS, 2020).



Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia.

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020 (Diolah)

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Indonesia menunjukkan perubahan berarti selama periode tahun 2016-2020 pada komposisi komponen pengeluaran terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi komponen-komponen juga terdapat penurunan pada sisi pengeluaran terhadap ekonomi terutama pada tahun 2020. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 2 komponen yang meningkat, yakni PK-RT (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga) dan Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah (PK-P). Meskipun PK-P bukan termasuk salah satu kontributor tertinggi dalam pembentukan PDB, besaran kontribusi komponen ini menunjukkan peningkatan dari 8,81 persen pada tahun 2019 menjadi 9,29 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (BPS,2020). Berdasarkan komponen pengeluaran, struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,62 persen; diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,33 persen; dan pada urutan ketiga adalah komponen Ekspor sebesar 18.41%. Sementara komponen Impor sebagai komponen pengurang dalam PDB memberikan kontribusi sebesar 18,90%.

Pada prinsipnya, anggaran pertahanan suatu negara berada pada rentang 2-4 persen dari PDB. Pengeluaran pertahanan di negara berkembang dimotivasi oleh kebutuhan keamanan (baik internal maupun eksternal) dan kendala yang disebabkan oleh variabel ekonomi seperti pendapatan per kapita yang rendah dan defisit anggaran. Besaran jumlah anggaran pertahanan tidak terlepas dari bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Jika dibandingkan dengan negara maju, rata-rata negara berkembang menghabiskan 3 hingga 4 persen dari PDB mereka pada 1980 hingga saat ini untuk militer.

4.1.4 Deskripsi Data Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Investasi dan konsumsi rumah tangga. Namun, berbagai fenomena dan risiko perekonomian global memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Tantangan perekonomian tersebut semakin perlu mendapat perhatian mengingat beberapa aspek domestik jangka pendek yang saling

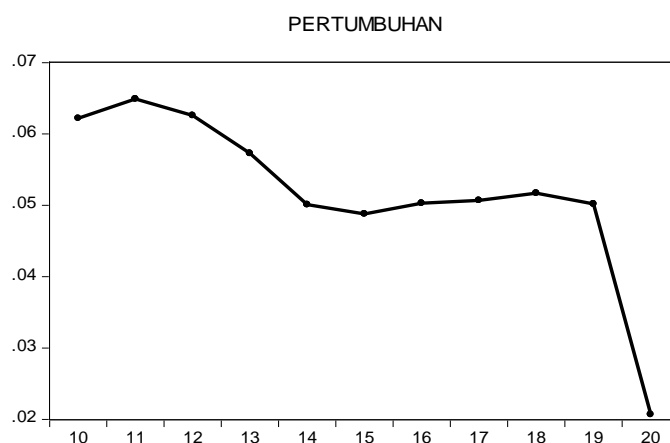
berhubungan menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pergeseran dalam perekonomian global dewasa ini masih terus berlanjut, saling berkaitan dan memengaruhi dinamika perkembangan ekonomi dunia hingga dari tahun ke tahun hingga tahun 2020.

Tabel 4.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

TAHUN	PERTUMBUHAN
2010	6.22%
2011	6.49%
2012	6.26%
2013	5.73%
2014	5.01%
2015	4.88%
2016	5.03%
2017	5.07%
2018	5.17%
2019	5.02%
2020	2.07%

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum tetap berdaya tahan dengan capaian 5,02% pada 2019. Kontraksi pertumbuhan global mencapai 3,27 persen, dimana Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan paling dalam sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, bahkan untuk periode tahun 2010-2020.



Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020 (Diolah)

Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di Asia (BPS,2020). Pada tahun 2020, dunia mengalami krisis yang disebabkan pandemi COVID-19. Dampak pandemi tersebut melanda seluruh Negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara. Hal ini senada dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang tidak akan mencapai target yang ditetapkan seiring dengan besarnya *downside risk* yang dihadapi.

Beberapa risiko negatif yang dapat memicu rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Pertama*, perlambatan ekonomi Tiongkok akibat wabah Covid-19 dan perang dagang. *Kedua*, volatilitas kelanjutan perang dagang yang akan dipengaruhi oleh hasil pemilihan Amerika Serikat. *Ketiga*, ketegangan di Timur Tengah yang akan meningkatkan harga minyak. *Keempat*, *shortfall* pendapatan negara pada tahun 2019 akan berdampak pada realisasi fiskal tahun 2020. Faktor lain yang berpotensi mendorong ketidakpastian dan menekan pertumbuhan ekonomi global adalah hutang pemerintah dan korporasi di seluruh dunia yang meningkat pesat (lebih dari USD 70 triliun) dalam satu dekade terakhir, serta perkembangan geopolitik di Timur-Tengah (antara AS, Arab Saudi, Turki, Irak, dan Iran) dan Laut Cina Selatan (antara Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Filipina).

Dengan berbagai fenomena dan perkembangan yang terjadi pada perekonomian global, sudah pasti memberi dampak kepada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terkendala oleh berbagai masalah struktural, sehingga sejak tahun 2015 tumbuh relatif stagnan pada kisaran 5% per tahun dan dibayangi ancaman jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap* – MIT). Kendala dalam negeri antara lain disebabkan oleh (Bappenas,2019):

- 1) Kapasitas produksi nasional belum optimal karena industri manufaktur kurang berkembang. Hal ini menyebabkan perannya terhadap pembentukan PDB sejak reformasi terus menurun dari sekitar 32 persen pada tahun 1998 menjadi 20 persen tahun 2018. Selain itu, ekspor yang masih didominasi oleh bahan mentah dengan nilai tambah rendah karena belum diproses dalam industri pengolahan.
- 2) Belum efektifnya reformasi birokrasi dan deregulasi untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga kurang optimal untuk mendorong investasi (terutama di industri pengolahan dan sektor yang bernilai tambah tinggi) serta menghambat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang pada tahun 2019 dan 2020 tetap di peringkat 73 dari 190 negara.
- 3) Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dan dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) PBB tahun 2018 berada di peringkat 111 dari 189 negara. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kualitas pendidikan di Indonesia yang belum setara dengan negara-negara *emerging economies* lainnya

4.2 HASIL PENGUMPULAN DATA

Data-data pada penelitian diperoleh melalui pengumpulan data-data tahunan (*annual*). Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain (Hermawan, 2006). Definisi lain daripada data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011).

Tabel 4.5 Data Mentah masing-masing Variabel Penelitian

TAHUN	ANGGARAN PERTAHANAN	APBN	PDB	% PERT.EKO
2010	42.391.600.000.000	992.248.500.000.000	6.446.851.900.000	6.22%
2011	50.033.900.000.000	1.165.252.500.000.000	7.419.187.100.000	6.49%
2012	61.226.856.461.000	1.435.406.719.000.000	8.230.925.900.000	6.26%
2013	87.706.685.334.000	1.683.011.103.699.000	9.087.276.500.000	5.73%
2014	86.185.628.390.000	1.842.495.299.913.000	10.094.928.900.000	5.01%
2015	105.907.340.480.000	1.793.588.917.000.000	11.526.332.800.000	4.88%
2016	109,003,928,025,000	1.822.545.849.136.000	12.401.728.500.000	5.03%
2017	117.506.617.827.295	1.750.283.380.176.000	13.589.825.700.000	5.07%
2018	106.832.343.039.117	1.894.720.327.000.000	14.838.756.000.000	5.17%
2019	115.424.549.199.337	2.165.111.800.000.000	15.832.535.400.000	5.02%
2020	127.424.093.734.000	2.233.196.701.660.000	15.434.151.800.000	2.07%

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020 (Diolah)

Adapun pengumpulan data sekunder merupakan proses pengumpulan data-data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait berkaitan dengan penelitian ini, seperti World Bank, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Regresi Linear Berganda (Ordinary Last Square). Penelitian ini menggunakan data menurut deret waktu (time series) berupa data dari tahun 2010 – 2020

4.3. HASIL PENGOLAHAN DATA

4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pada subbab ini, akan dibahas mengenai hasil analisis deskriptif yang menggambarkan secara umum data yang digunakan dalam penelitian. Hasil dari analisis deskriptif akan digunakan sebagai indikator untuk melihat pergerakan Anggaran Pertahanan pada tahun 2010 – 2020. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan bagaimana hubungan keterkaitan variabel APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Tabel 4.6 Nilai Mean, Median, Maximum, Minimum, Standart Deviasi Masing-Masing Variable

	Anggaran Pertahanan	APBN	PDB	PERTUMBUHAN
Mean	9.18	1.71	1.14	0.051
Median	1.06	1.79	1.15	0.050
Maximum	1.27	2.23	1.58	0.064
Minimum	4.24	9.92	6.45	0.020
Std. Dev.	2.89	3.80	3.33	0.011
Observations	11	11	11	11

Sumber: Lampiran 1 Hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah data observasi berjumlah 11 dan dari 11 data yang diobservasi, maka dapat disimpulkan:

- 1) Pada variabel APBN ditunjukkan bahwa bahwa nilai minimum yang dihasilkan sebesar 9.92, nilai maksimum sebesar 2.23, menunjukkan laju yang fluaktif walaupun jarak nilai maksimum dan minimum yang tidak jauh namun kondisi tersebut tetap dapat berpengaruh pada Anggaran Pertahanan. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1.71, dan nilai standard deviasi sebesar 3.80. Nilai mean lebih rendah daripada nilai standar sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, data kurang bervariasi dan penyebaran nilai rata.
- 2) Pada variabel PDB ditunjukkan bahwa bahwa nilai minimum yang dihasilkan sebesar 6.45, nilai maksimum sebesar 1.58, memiliki rentang interval yang cukup jauh sehingga fluaktuasi Anggaran Pertahanan memiliki daya saing yang reatif bervariasi. Dengan meningkatnya PDB maka akan mempengaruhi Anggaran Pertahanan. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1.14, dan nilai standard deviasi sebesar 3.33. Nilai mean lebih rendah daripada nilai standar

sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, data kurang bervariasi dan penyebaran nilai rata

- 3) Pada variabel Pertumbuhan ditunjukkan bahwa bahwa nilai minimum yang dihasilkan sebesar 0.020, nilai maksimum sebesar 0.064, menunjukkan laju yang fluaktif walaupun jarak nilai maksimum dan minimum yang tidak jauh namun kondisi tersebut tetap dapat berpengaruh pada Anggaran Pertahanan. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.051, dan nilai standard deviasi sebesar 0.011. Nilai mean lebih besar daripada nilai standar sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, data bervariasi dan bersifat homogen dan penyebaran nilai rata

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian data pada variabel dalam model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian sebagai langkah estimasi untuk melihat apakah suatu model sudah memenuhi syarat-syarat ekonometrika dikatakan baik atau tidaknya maka diperlukan uji asumsi klasik. Suatu model dikatakan baik secara ekonometrika apabila telah melalui uji pada ekonometrika yang pada dasarnya akan menghasilkan estimasi secara *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Pada uji asumsi klasik perlu dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk menjawab asumsi bahwa dalam sebuah permodelan harus BLUE, dan tidak terjadi regresi lancung (*Spurious Regression*). Selain daripada itu, harus lolos dari beberapa penyimpangan dari beberapa uji yaitu serial normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Hasil estimasi data variabel penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa terdapat pengujian menghasilkan diagnosa positif. Berdasarkan tabel 4.7 semua kriteria asumsi klasik terpenuhi.

Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Diagnosis	Test	Output Hitung	Probabilitas (5%)	Kesimpulan
Normalitas	<i>Jarque – Berra Test</i>	1.310988	0.519186	Data berdistribusi normal.
Autokorelasi	<i>Breusch Godfrey Test</i>	1.310824	0.5192	Tidak terdapat autokorelasi
Multikolinearitas	<i>Correlation Matrix</i>	-	-	Tidak terdapat multikolinearitas
Heterokedastisitas	<i>White Test (no cross Term)</i>	14.87338	0.0945	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 3 Hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian dengan menggunakan Jarque-Bera Test menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan pembuktian nilai probabilitas Jarque-bera lebih besar daripada nilai $\alpha = 5\%$ ($0.5192 > 0,05$).

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Dari table uji autokorelasi dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model. Hal tersebut ditunjukkan oleh signifikannya nilai probabilitas yang lebih dari $\alpha = 5\%$ yang dibuktikan dengan besar nilai probabilitas $Obs \cdot R\text{-squared}$ lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ ($\alpha = 5\% = 0,05$) dengan nilai 0.5192 ($0,2071 > 0,05$).

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melihat adanya hubungan linear antar semua variabel independen dalam penelitian, sedangkan variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen pada penelitian sehingga variabel dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara pendekatan korelasi parsial

dimana batas terjadinya korelasi antar-variabel adalah tidak lebih dari 10.801. Pada persamaan dalam penelitian tidak terdapat multikolinearitas sebab nilai R-squared variabel dependen lebih besar dari nilai R-squared variabel independen atau tidak lebih dari 10.801

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji sebuah model mengalami ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan White test untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama dari masing-masing variabel bebas dan untuk mendeteksi tidak adanya masalah ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain pada model. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0.0945 > 0,05$).

4.4. Hasil Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda/*Ordinary Least Square (OLS)*

Pengujian hipotesis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian Regresi Linear Berganda (*Ordinary Last Square*) dengan uji klasik untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah:

- a. APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama (simultan) memberi pengaruh terhadap Anggaran Pertahanan
- b. APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia
- c. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia
- d. Tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia

Tabel 4.8 Hasil estimasi Metode Ordinary Least Square (OLS)

	C	β_1 (APBnt)	β_2(PDBt)	β_3(PEt)
Coefficient	4.20	0.031306	4.322670	-2.16
t-Statistic	0.009685	1.411244	1.912058	-0.496351
Prob	0.9925	0.2010	0.0975	0.6349
R-Squared	0.914817			
Adj. R-Squared	0.878310			
Prob F-Statistic	0.000406			

Sumber: Lampiran 2 Hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai koefisien-koefisien regresi adalah dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Last Square*). Dalam penelitian uji hipotesis ini akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat yang nantinya dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. Uji F dilakukan untuk membuktikan pengaruh secara serentak variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.4.1 Hasil Uji Keterandalan Model/Uji Signifikansi Simultan (Uji F/F-test)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen perlu dilakukan pengujian koefisien regresi secara serempak. Uji keterandalan model (uji F) merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Dikatakan layak (andal) jika model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila probabilitas F-hitung lebih besar dari tingkat signifikansi maka

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dimana jika probabilitas $F_{hitung} < F_{\alpha}$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

Hasil estimasi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan (simultan) ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya anggaran pertahanan yang dibuktikan dari nilai F-Hitung yaitu 0,000406; hasil probabilitas F-hitung $< \alpha$ ($0.000406 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Anggaran Pertahanan.

4.4.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T/T-test)

Uji t dalam regresi linier berganda adalah untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat. Dikatakan tepat jika parameter tersebut mampu menjelaskan bagaimana perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier).

Jika probabilitas $t_{hitung} < t_{\alpha}$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel bebas/variabel independent Anggaran Pertahanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ketiga dependet variabel. Sedangkan jika $t_{hitung} > t_{\alpha}$ ($\alpha = 0,05$). H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel bebas/variabel independent/ AP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat/ke-tiga dependet variabel.

Tabel 4.9 Hasil Uji signifikansi Metode OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.20E+11	4.34E+13	0.009685	0.0092
APBN	0.031306	0.022183	1.411244	0.0201
PDB	4.322670	2.260742	1.912058	0.0475
PERTUMBUHAN	-2.16E+14	4.34E+14	-0.496351	0.0063

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews

- 1) nilai t-hitung APBN sebesar 1.411244 dengan probabilitas t-hitung sebesar 0.0201. Probabilitas t-hitung $< \alpha$ (0.0201 < 0.05); memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan; sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
- 2) nilai t-hitung PDB sebesar 1.912058, dengan probabilitas t-hitung sebesar 0.0475. Probabilitas t-hitung $< \alpha$ (0.0474 < 0.05); memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan; sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
- 3) nilai t-hitung Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0.496351, dengan probabilitas t-hitung sebesar 0.0063, Probabilitas t-hitung $< \alpha$ (0.0063 < 0.05) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda (R^2) adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berganda pada hasil estimasi adalah Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square. Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel

dependen). Adjusted R-Square digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.

Tabel 4.10 Hasil R-Squared

	C	β_1 (APBNt)	β_2(PDBt)	β_3(PEt)
Coefficient	4.20	0.031306	4.322670	-2.16
t-Statistic	0.009685	1.411244	1.912058	-0.496351
Prob	0.9925	0.2010	0.0975	0.6349
R-Squared	0.914817			
Adj. R-Squared	0.878310			
Prob F-Statistic	0.000406			

Sumber: Hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews

Nilai koefisien determinasi berganda R-Squared dalam hasil adalah sebesar 0.914817, sesuai dengan hipotesis awal bahwa semua variabel independen APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 91% mempengaruhi besar Anggaran Pertahanan, dan sisanya 0,9% dipengaruhi oleh variabel di luar model tersebut. Dengan hasil hitung nilai koefisien determinasi berganda R-Squared penelitian, juga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat kuat.

4.5 Pembahasan

Hasil estimasi dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* yang sudah dilakukan pada penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan variabilitas yang mempengaruhi kenaikan Anggaran Pertahanan.

Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian Saadet Deger and Somnath Sen berjudul "*Military Expenditure And Developing Countries*" (1995) dalam penelitian menyatakan bahwa untuk memahami sifat pengeluaran militer terutama di negara berkembang,

maka harus melampaui bidang ekonomi. Adapun bidang ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pertahanan, keamanan serta pengembangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, yang diberikan oleh ukuran standar pendapatan per kapita, tidak berpengaruh atau kontradiktif terhadap anggaran pertahanan.

Dalam penelitian Dogan dan Cheong (2006) mengenai Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Nasional: Uji Kausalitas Untuk Lima Negara Asia Tenggara (*Government Expenditure And National Income: Causality Tests For Five South East Asian Countries*). Peneliti menggunakan metode kointegrasi Johansen-Juselius untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional per kapita riil dan pengeluaran pemerintah per kapita riil di semua negara sampel dan metodologi yang dikembangkan oleh Granger untuk menguji dua hipotesis. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat dari pendapatan per kapita riil ke pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah tidak memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di empat negara dalam studi

Pieroni (2007) dalam penelitiannya mengamati bagaimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh penting terhadap laju pertumbuhan jangka panjang. peneliti menemukan hubungan negatif yang lemah antara bagian pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi. negara-negara dengan beban militer yang lebih rendah menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara beban militer dan pertumbuhan dengan estimasi nonparametrik yang mendekati analisis parametrik. Sebagai kesimpulan, hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan mungkin mengandung nonlinier selain yang dihipotesiskan.

Avatara (2013) dalam penelitiannya mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah

Indonesia, Belanja Modal, dan Kebijakan Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011 di kaji dari sisi fiskal. Secara parsial, Penerimaan perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011. Secara parsial, variable Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia (UPI). Belanja Modal (BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PDB). Penerimaan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), Utang pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), pengaruh variabel Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Pada bagian diskusi ini akan dijelaskan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum, variabel yang mempengaruhi Anggaran Pertahanan di Indonesia adalah variabel APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi.

4.5.1 Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Anggaran Pertahanan

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan tahun 2010-2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki pengaruh memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibuktikan dengan probabilitas t-hitung sebesar $0.0201 < \alpha$, $0.0201 < 0.05$. Anggaran penerimaan belanja negara merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Robert D Lee, Jr dan

Ronald W Johnson, pengertian anggaran (budget) adalah “*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Postur APBN meliputi komponen anggaran pemerintah yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri seperti pajak dan penerimaan bukan pajak, dan hibah, sedangkan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri.

Belanja Negara sangat penting untuk kehidupan masyarakat, maka penyerapan anggaran belanja negara diharapkan dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif. Di Indonesia, jika ditinjau dari sisi pengeluaran dalam

anggaran pemerintah dialokasikan pada salah satunya untuk sektor pertahanan dengan penanggung jawab anggaran pada Kementerian Pertahanan yang terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran gaji militer dan personil, belanja barang untuk perawatan dan pemeliharaan serta belanja modal untuk modernisasi atau pembelian alutsista (Yusgiantoro,2014).

Anggaran belanja pertahanan merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran Pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan *anggaran publik* yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Anggaran Pertahanan juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja pertahanan yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Besaran anggaran belanja pertahanan suatu negara mencerminkan kemampuan suatu negara untuk membiayai kegiatan militernya. Tujuan dari diadakannya belanja pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia). Hal ini sejalan dengan *Adam Smith* dimana tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama.

Secara konsep teoritis, APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan, sehingga jika APBN semakin tinggi maka Anggaran Pertahanan juga akan semakin besar secara mekanismenya. Sektor pertahanan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah dimana anggaran Kementerian Pertahanan juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya dan meningkat setiap tahunnya. Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan APBN yang pada akhirnya memberi pengaruh signifikan terhadap Anggaran Pertahanan adalah ditinjau dari faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Salah satu persyaratan untuk

meningkatkan pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum menyatakan persetujuan untuk meningkatkan anggaran pertahanan yaitu, *Pertama*, kondisi keuangan pemerintah yang terbatas. Situasi ini memberatkan keuangan Negara sehingga peningkatan APBN sulit untuk direalisasikan karena keterbatasan dana dan pada akhirnya juga menghambat kenaikan anggaran pertahanan. *Kedua*, peningkatan anggaran pertahanan bisa menjadi kontra-produktif dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perhitungan dan perencanaan belanja pertahanan adalah tekanan inflasi dalam tahun berjalan yang akan mempersulit pada akhirnya.

Perlu ditekan bahwa tingginya alokasi anggaran belanja pertahanan menunjukkan bahwa secara umum keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional. Penurunan anggaran pertahanan di sejumlah negara tertentu pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian anggaran dan tidak merepresentasikan menurunnya keinginan untuk pembangunan kekuatan. Lain halnya dengan negara-negara yang memiliki anggaran pertahanan yang besar sudah pasti memiliki APBN yang besar juga. Upaya peningkatan anggaran pertahanan harus dibarengi dengan peningkatan APBN dan sebaliknya.

Adapun kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan anggaran belanja yang pada akhirnya menaikkan anggaran pertahanan adalah:

- 1) Upaya pemerintahan dalam menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran. Defisit anggaran adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluaran yang cenderung negatif dimana pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan. Upaya yang paling praktis dalam meminimalisir defisit adalah dengan melakukan rasionalisasi pengeluaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan

pemotongan belanja K/L dan penghematan pengeluaran, pengurangan subsidi dengan asumsi akan meningkatkan anggaran belanja serta pengurangan pinjaman luar negeri secara bertahap.

- 2) Upaya menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman dan mengendalikan keseimbangan primer. Jika keseimbangan primer bernilai negatif jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang dan sebaliknya. Kondisi fiskal yang sehat juga didukung dengan penurunan defisit keseimbangan primer. Menjaga target defisit APBN dengan koordinasi yang lebih erat antara unit pengelola penerimaan, pengeluaran dan utang. Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, dalam arti bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Adapun upaya dalam pemenuhan defisit APBN dilakukan melalui strategi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri didasarkan pada perkiraan yang realistis, disesuaikan dengan keadaan keuangan negara serta mempertimbangkan berbagai hal, seperti sumber-sumber pinjaman dan persyaratan hutang. Pinjaman luar negeri mencakup setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, serta dana yang dapat cepat dicairkan. Perlu diperhatikan bahwa pinjaman luar negeri tidak direkomendasikan sebab pada dasarnya negara berupaya untuk mengurangi beban pinjaman bahkan penjadwalan kembali pinjaman yang sudah jatuh tempo. Pinjaman luar negeri juga memberi efek pada tingkat suku bunga yang menaik sehingga terjadi kelangkaan pada pasar uang.
- 3) Pengutamakan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menutup kekurangan pembiayaan defisit APBN, dengan terlebih dahulu

memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Instrumen ini dapat digunakan dalam rangka mengurangi beban utang akibat kebijakan defisit APBN. Selain sebagai salah satu sumber pembiayaan, SAL juga dapat digunakan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untukantisipasi terhadap tingginya ketidakpastian. Penggunaan SAL secara umum juga menjadi bagian dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional terutama dimasa-masa krisis dan pandemi.

- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal dan jika ditinjau secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Perlu diperhatikan bahwa ekonomi pertahanan, termasuk belanja/pengeluaran pertahanan didalamnya memiliki keterkaitannya yang erat dengan sektor fiskal (Yusgiantoro,2014). Upaya mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara. Langkah utama yang diambil pemerintah untuk memantapkan kebijakan fiskal adalah meningkatkan pendapatan pemerintah dengan titik berat pada peningkatan penerimaan perpajakan (Boediono, 2003). Hingga saat ini, pajak masih merupakan andalan utama pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Anggaran pertahanan di banyak negara juga dibiayai oleh pajak. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak melalui perluasan basis data wajib pajak dan peningkatan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, dukungan anggaran pertahanan yang berasal dari penerimaan pajak harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and auditable*).
- 5) Pajak melalui fungsinya sebagai fungsi anggaran atau Penerimaan (*budgetair*) dimana pajak sebagai salah satu sumber dana yang

digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Upaya optimalisasi penerimaan negara dengan kebijakan mendorong optimalisasi penerimaan pajak sehingga rasio pajak per PDB semakin meningkat. Pada saat PDB meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Secara mekanismenya, peningkatan PDB akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk yang secara bersamaan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan untuk membayar pajak, sehingga penerimaan perpajakan akan bertambah. Surplus ekonomi yang sebagai dikontribusikan oleh negara dalam bentuk pajak pada akhirnya akan digunakan negara untuk membiayai anggaran pertahanan.

- 6) Pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara dengan memperhatikan sisi penerimaan negara. Efisiensi ekonomi menekankan pada pelaksanaan efektivitas kegiatan yang menghasilkan output optimal. Peningkatan kualitas belanja negara tersebut melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara melalui perbaikan struktur belanja negara agar menjadi lebih produktif serta efisien dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara optimal. Hal ini tercermin dari belanja yang dikategorikan *sustainable* apabila secara agregat sejalan dengan kerangka ekonomi makro jangka menengah yang menghasilkan strategi defisit/surplus dan utang yang berkelanjutan. Belanja negara dikatakan efisien apabila mampu mencapai hasil-hasil prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan alokasi belanja yang tidak boros dan berhasil mencapai target-target program pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Efisiensi untuk meningkatkan kualitas belanja negara terbagi menjadi tiga; 1) efisiensi alokasi, 2) efisiensi teknis, 3) efisiensi ekonomi (Kemenkeu, 2021). Efisiensi alokasi

mempunyai arti belanja negara harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*) serta menekankan akurasi pengalokasian. Efisiensi teknis merujuk kepada kapasitas untuk menerapkan program-program dan melaksanakannya dengan biaya yang paling efisien.

- 7) Penerimaan negara diusahakan terutama bersumber dari dalam negeri, oleh karena sumber dari luar negeri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan dapat mengurangi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.
- 8) Upaya pengurangan dalam pemberian subsidi. Subsidi dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara tidak efisien sebab sering terjadi penerima akhir bukan dari golongan berpendapatan rendah. Fenomena lain adalah adanya beban subsidi energi dan non-energi menekan belanja negara sebab beban subsidi energi merupakan yang terbesar dibandingkan belanja yang lain. Dalam rangka penyehatan APBN, mengurangi subsidi energi adalah langkah yang tepat sehingga dapat menamba porsi anggaran dan belanja negara.

4.5.2 Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Anggaran Pertahanan

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris selanjutnya terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan tahun 2010-2020 bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Probabilitas t-hitung sebesar $0.0475 < \alpha$, $0.0475 < 0.05$; memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan.

Dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, pemerintah melakukan kegiatan pengeluaran untuk membiayai semua aktivitasnya. Dana pengeluaran pemerintah tersebut dapat dipenuhi dari pendapatan nasional. Salah satu indikator alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasa disebut dengan pendapatan nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada periode tertentu. Pendapatan nasional adalah dana yang diperoleh pemerintah yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam bentuk penerimaan maupun hutang, dan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran dan belanja pemerintah. Secara harafiah, prinsip daripada pendapatan nasional mewakili konsep Produk Domestik Bruto (*Gross domestic Product/GDP*). Secara konsep, Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai hasil produksi, pendapatan, dan atau pengeluaran nasional suatu perekonomian (Kusnendi, 2002). Melalui PDB maka dapat diukur beberapa hal pada waktu bersamaan seperti total pendapatan masyarakat dalam suatu perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian

PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dimana semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi negara tersebut. Selain itu, indikator PDB umumnya digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah suatu negara dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan ekonomi di suatu negara (Yusgiantoro, 2014).

PDB memiliki pengaruh dan keterikatan terhadap pendapatan negara, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, PDB juga akan semakin meningkat. Dalam teori pembangunan ekonomi diketahui bahwa PDB dan belanja negara mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Jika ditinjau pada konteks ekonomi makro, pengeluaran/belanja pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto

PDB. Dengan peningkatan PDB maka pemerintah semakin banyak melakukan pembangunan dan kebijakan lainnya untuk mensejahterakan masyarakat yang tercermin dari peningkatan anggaran belanja.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengendalikan dinamika persenjataan adalah melihat besaran anggaran pertahanan suatu negara. Belanja pertahanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan PDB dan menjadi ukuran yang baik dalam menunjukkan besarnya beban pertahanan bagi perekonomian negara. Anggaran pertahanan adalah cerminan seberapa kuat suatu negara dalam membangun kekuatan militernya. Dengan kondisi perekonomian yang kuat, maka kekuatan militernya akan kuat dengan didukung oleh jumlah anggaran yang memadai juga.

Persoalan yang kerap terjadi adalah tingkat relatif PDB untuk suatu negara berbeda dengan dengan negara lain, karena anggaran pertahanan suatu negara umumnya memuat sektor pembiayaan yang berbeda dengan negara lain. Setiap tahun diduga terdapat lebih dari 1,5 triliun USD atau 2.7% dari PDB dunia digunakan untuk belanja pertahanan (pembelian alutsista,dll). Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna peningkatan PDB adalah melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, seperti:

- 1) PDB berpengaruh utama kepada pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu, upaya peningkatan penerimaan pajak lebih di maksimalkan.
- 2) Pengelolaan kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis. Perlu diperhatikan bahwa tingkat suku bunga adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, dimana ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan suku bunga yang tinggi.

- 3) Pemerintah mengoptimalkan perannya dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif secara transparan dan diatur dengan undang-undang.
- 4) Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi guna meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan
- 5) Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui pembangunan sistem ekonomi kerakyatan
- 6) Peningkatan jumlah ekspor dan impor guna meningkatkan devisa negara. Namun, upaya peningkatan jumlah ekspor sangat perlu diperhatikan sehubungan dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui pinjaman luar negeri menimbulkan kewajiban pembayaran kembali di masa mendatang, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Ekspor terdiri dari migas dan non-migas, namun ekspor migas tidak dapat diharapkan dalam jangka panjang terutama karena adanya ketidakpastian harga minyak di pasaran internasional, dan dalam kenyataannya migas merupakan sumber-sumber ekonomi yang tidak dapat diperbaharui (non-renew-able resources). Ekspor non-migas terutama padat karya yang meningkat dipercaya mampu mendukung penerimaan dalam negeri, dengan keuntungannya bagi negara diantaranya, perluasan memperluas kesempatan kerja, pasar, peningkatan mutu dan efisiensi barang-barang ekspor, perdagangan luar negeri Indonesia menjadi lebih kuat terhadap pengaruh-

pengaruh eksternal, sehingga kestabilan ekonomi dalam negeri lebih terjamin.

- 7) Peningkatan investasi akan meningkatkan laju pertumbuhan sehingga PDB akan bertambah. Dana investasi diperoleh dari tabungan pemerintah dan masyarakat. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dalam rangka penyediaan barang publik untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Sumber dana investasi juga berasal dari investasi asing langsung (PMA) yang juga memberi pengaruh dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

4.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Anggaran Pertahanan

Berdasarkan pada hasil estimasi secara parsial untuk menjawab pertanyaan empiris terhadap penelitian variabel Anggaran Pertahanan tahun 2010-2020 bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, yang dibuktikan dengan Probabilitas t-hitung sebesar $0.0063 < \alpha$ ($0.0063 < 0.05$), memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan.

Hasil estimasi yang tidak sesuai dengan hipotesis awal ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Deger (1995) dengan judul *Military Expenditure And Developing Countries*” meneliti terkait hubungan pengeluaran militer di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, keamanan dan pemerintahan. Menurut Deger, upaya peningkatan pengeluaran militer melalui pertukaran antara dua jenis barang publik; jika belanja militer dilakukan dengan mengorbankan investasi dalam pendidikan maka pembentukan keterampilan akan terhambat dan tingkat pertumbuhan jangka panjang dapat terpengaruh secara merugikan. Upaya selanjutnya

adalah ketika pengeluaran pemerintah sipil dikurangi untuk membiayai alokasi pertahanan tambahan dan ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, jika tambahan pengeluaran pertahanan dibiayai melalui perpajakan maka hal ini dapat mengurangi konsumsi dan / atau investasi yang mempengaruhi kesejahteraan atau akumulasi modal fisik.

Penelitian yang menguatkan selanjutnya adalah Yakolev (2007) dengan judul "*Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth*". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diuji menggunakan FEM, REM, serta Arellano-Bond GMM menunjukkan jika berdasarkan hasil regresi Sollow-style, pengeluaran militer memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Dogan dan Cheong (2006) dengan judul (*Government Expenditure And National Income: Causality Tests For Five South East Asian Countries*), tidak spesifik mengarah kepada anggaran belanja pertahanan. Namun, berdasarkan hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hukum Wagner tidak didukung oleh data dari lima negara dalam sampel. Ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat dari pendapatan per kapita riil terhadap pengeluaran pemerintah per kapita riil. Temuan dari peneliti juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di empat negara dalam studi (Filipina adalah pengecualian). Adapun menurut Dogan dan Cheong, peningkatan belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, seiring kemajuan industrialisasi, aktivitas sektor publik akan menggantikan aktivitas sektor swasta karena fungsi administratif dan pelindung negara akan semakin penting selama proses industrialisasi. Peran negara dalam menjaga ketertiban dan ketertiban serta perannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan regulasi ekonomi kemungkinan besar akan semakin terasa karena semakin kompleksnya kehidupan ekonomi dan urbanisasi yang terjadi pada masa industrialisasi. Selain itu, pengeluaran belanja negara untuk layanan budaya dan kesejahteraan (termasuk pendidikan dan redistribusi pendapatan) juga

akan meningkat karena negara mengalami industrialisasi karena elastisitas pendapatan yang tinggi dari permintaan untuk layanan ini dimana, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, permintaan akan layanan yang disebutkan, yang biasanya disediakan oleh pemerintah, meningkat dengan cepat, dan meningkatkan porsi pengeluaran sektor publik.

Penelitian terkait hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi di 15 negara di Uni Eropa dengan menggunakan uji kausalitas granger dan uji kointegrasi pada periode waktu tahun 1961 sampai dengan tahun 2000 oleh Kollias, Manolas, dan Paleologou (2004) juga menunjukkan jika tidak terdapat (negatif) hubungan kausalitas antara pengeluaran militer terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu Negara. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika nilai nyata produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada nilai nyata produksi pada tahun yang sebelumnya. Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2013) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Indikator pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan output dalam suatu perekonomian yang mencerminkan kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah. Kebijakan belanja atau pengeluaran pemerintah terbukti secara empiris memiliki pengaruh atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Klasik Keynes membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah, beranggapan bahwa campur tangan

pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah (Sukirno, 2006). Aliran Keynesian berpandangan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, belanja negara termasuk di dalamnya belanja pertahanan menjadi salah satu alat kebijakan yang penting dan ideal digunakan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sebagai contoh adalah kasus perang yang terjadi di negara konflik atau negara-negara penghasil alutsista utama dan terbesar, terjadi peningkatan anggaran pertahanan salah satunya dalam bentuk investasi pada industri pertahanan. Industri pertahanan secara tidak langsung memberi keuntungan dengan meningkatkannya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Namun, di Indonesia, industri pertahanan belum mampu memberikan keuntungan dalam aspek ekonomi walaupun setiap tahun terjadi peningkatan anggaran setiap tahunnya. Kenaikan anggaran hanya meningkatkan belanja tetapi tidak disertai dengan pengembalian yang surplus.

Namun, dalam Hukum Wagner, yaitu hukum meningkatnya ekspansi aktifitas publik, dimana Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya yang mempengaruhi pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Hal ini sesuai dengan *ambition hypotesis* oleh Castillo (2001) yang menyatakan bahwa anggaran pertahanan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya, dengan kata lain semakin besar kekuatan dan kekayaan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya. Negara akan mengejar peningkatan ekonomi dan kekuatan pertahanan merupakan tujuan yang tertinggi dari negara.

Hasil regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Anggaran Pertahanan. Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap anggaran pertahanan dibuktikan melalui berbagai kebijakan oleh pemerintah ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Adapun kebijakan yang menjadi perhatian pemerintahan adalah memfokuskan kepada berbagai sektor seperti pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah dalam kebijakannya untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran pertahanan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga kestabilan perekonomian negara. Berbagai upaya serta kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

- 1) Akumulasi modal yang tercermin dari upaya peningkatan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat. Modigliani-Miller menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang ditentukan oleh pertumbuhan investasi di negara tersebut. Namun, pertumbuhan investasi seringkali tidak optimal karena adanya hambatan pembiayaan yang akan mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan investasi. Salah satu teori pembangunan yang sampai saat ini masih dipakai, dan merupakan perluasan dari analisis Keynes adalah teori dari Evsey Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini, yang bekerja secara terpisah,

mencapai kesimpulan yang sama yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat negara tersebut juga akan rendah. Pentingnya investasi (jangka panjang) di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena aspek investasi mempunyai peran ganda, yaitu investasi menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal

- 2) Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia menstabilkan tingkat suku bunga sebab tingkat suku bunga yang tinggi akan membatasi kredit sehingga melemahkan dunia bisnis dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Upaya penurunan bunga BI Rate diperlukan untuk mendorong perekonomian, yang tercermin dari peningkatan konsumsi masyarakat dan kinerja dunia usaha/industri. Keringanan suku bunga acuan diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan, sehingga mengurangi ongkos produksi. Hal ini sangat membantu sektor usaha dan industri dalam peningkatan daya saing hasil produksi.
- 3) Peningkatan industri pada karya dan berbagai aspek perekonomian negara yang diikuti oleh peningkatan angkatan kerja produktif, kemajuan teknologi dan ekspor. Kemajuan teknologi memberikan cara atau metode terbaru dalam suatu pekerjaan. Hal ini tercermin pada negara maju yang memiliki industri besar dengan teknologi mutakhir. Teknologi yang mutakhir erat kaitannya dengan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan dan didukung oleh teknologi yang mutakhir dan didukung oleh pendistribusian yang lancar maka distribusi pendapatan per kapita suatu negara akan merata sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
- 4) Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 5 (lima) komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,

pengeluaran investasi, *export* dan *import*. Dari kelima komponen tersebut, komponen yang relatif dapat didorong oleh Pemerintah dalam jangka pendek adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah, dengan mengalokasikan dana untuk Perlindungan Sosial. Tujuan Perlindungan Sosial tersebut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Perlindungan Sosial tersebut diberikan antara lain melalui Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, subsidi listrik dan Program Keluarga Harapan. Di samping pengeluaran belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, Pemerintah juga mengalokasikan belanja yang digunakan Kementerian/Lembaga (K/L). Total belanja K/L (termasuk belanja Pemulihan Ekonomi Nasional). Belanja K/L merupakan belanja untuk konsumsi pemerintah, terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja Pegawai, Barang, dan Modal. Untuk dapat menggerakkan perekonomian, kegiatan pemerintah harus dipercepat dengan tetap menjaga *good governance* untuk merealisasikan belanja Barang dan Modal. Pengeluaran belanja tersebut seharusnya ditujukan untuk produksi dalam negeri sehingga usaha dalam negeri bergerak sehingga memberikan *multiplier effects* yang besar.

- 5) Keterlibatan UMKM adalah salah satu faktor yang memberi pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha. UMKM tergolong sangat padat karya sehingga berpotensi

untuk meningkatnya pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan. Adapun upaya pemerintah yang perlu untuk dimaksimalkan dalam upaya kemajuan UMKM adalah:

- Subsidi bunga/margin
- Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
- Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
- Penjaminan loss limit kredit UMKM
- Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
- Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
- Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

Adapun Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja juga disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

- 6) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok yang berkepanjangan dan masih terus dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemiskinan banyak ditemukan di wilayah pedesaan, sehingga pemerintah dengan program dana desa, menyalurkan dana langsung kepada masyarakat guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Upaya lain dari pemerintah yaitu perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa. Masyarakat golongan miskin juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah dan sedang berupaya untuk membangun dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Fungsi

dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja serta peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) dapat diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat.